

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPHN Kemenkumham. 2012. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkumham.
- Busroh, Abu Daud. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balal Pustaka.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT. Rafika Aditama.
- Hamidi, Jazim & Malik. 2008. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2020. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Kogoya, Willius. 2020. *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: CV. Widina Media Utama.

- Kusworo, Suryo Febry. 2023. *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif)*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Lukito, Ratno. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Moeljatno. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moniaga, Jamie S. Davidson, David Henley, & Sandra. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Purbantara, Arif & Mujianto. 2019. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendes.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press.
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyat, Iman. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta; Liberty.

- Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Sugarto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Ravika Adimatama.
- Sumiarni, Endang. 2020. *Pengakuan dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Thontowi. 2012. *Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Centre for Local Law Devolepment Studies /CLDS.
- Widjaja, Dyah Irawati & Hinijati. 2006. *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. Jakarta: UKI Press.
- Wignjodipuro, Surojo. 1982. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung.

JURNAL

- Abbas, Rusdi J. 2023. Potensi Papua Sebagai Jalur Perdagangan Internasional Indonesia Dengan Kawasan Pasifik. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6 Nomor 2.
- Adrianto, Rizal Rozzaka. 2023. Tinjauan Yuridis Perlindungan Dan Pengakuan Hukum Adat Di Papua. *Novum Jurusan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*. Volume 2 Nomor 25.
- Asnawi, Edy, Birman Simamora & Andriz. 2021., Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*. Volume 4 Nomor 2.
- Deda, Andreas Jefri. 2014. Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan

- Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, *Jurnal Administrasi Publik* Volume 11 Nomor 2.
- Fitriana, Yulianto Syahyu & Diana. 2021. Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Sasana*. Volume 7 Nomor 1.
- Juanda, Enju. 2017. Penalaran Hukum (Legal Reasoning). *Jurnal Galuh Justisi*. Volume 5. Nomor 1.
- Maladi, Yanis. 2010. Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen. *Mimbar Hukum* Volume 22. Nomor 3.
- Mandasari, Zayanti. 2014. Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* . Volume 21 Nomor 2.
- Oktriawan. 2022. Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Cempaka Purwakarta. Muttaqien; *Indonesian Journal Of Multidiciplinary Islamic Studies*, Volume 3 Nomor 1.
- Parlaungan, Perangin-angin, & Ramsul Nababan. 2020. Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume 17, Nomor 1.
- Pratama, Kadek Wahyu Adi. 2019. Recognition to the Customary Law of Indigenous Peoples in the Recognition to the Customary Law of Indigenous Peoples in the ILO Convention 1989: Practices from Ecuador and Norway, *Indonesian Journal of International Law Indonesian Journal of International Law*. Volume 16 Number 3.
- Putri, Resha Roshana. 2017 Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Law Review* Volume 5 Nomor 2.
- Safa'at, Muchamad Ali, 2020. Problem Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Universitas Brawijaya*. Volume 2 Nomor 1.
- Suharyo. 2019. Protection of Indigenous Land Law in Papua in the Welfare State, *Reachts*. Volume 8 Nomor 3.

Sumadi. 2022. Hakikat Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Omnibus Law Di Indonesia. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Volume 7, Nomor 1.

Tehupeiory, Aartje. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Tora*: Volume 5 Nomor 2.

Thahir, Baharuddin. 2019. Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Volume 2. Nomor 2.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

WEBSITE

<https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-8> diakses pada Tanggal 26 September 2024 Pukul 16.32 WIB